

**KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERGURUAN TINGGI
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKTOR PETERNAKAN**
*(Concept of Univrsity Social Responsibility for Community Empowerment in the
Livestock Sector)*

D. Acita Irawati¹ dan Kordiyana K. Rangga²

¹Akademi Peternakan Karanganyar, Jl. Lawa No. 115 Karanganyar Jawa Tengah 57716

²Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
E-mail korespondensi: diwiatjitta@gmail.com

Received: 28 September 2018; Revised: 14 February 2019; Accepted: 17 March 2019

Abstrak

Isu tentang tanggung jawab sosial perguruan tinggi atau University Social Responsibility (USR) dewasa ini semakin berkembang. Adanya kebijakan otonomi perguruan tinggi berdampak pada peningkatan biaya pendidikan tinggi, semakin membatasi peluang akses bagi keluarga kurang mampu. Sementara lulusan perguruan tinggi masih menempati posisi tertinggi sebagai pengangguran terdidik. Namun anehnya kebutuhan penyuluh di sektor peternakan masih sangat besar dan tidak kunjung terpenuhi. Fakta demikian menuntut kepekaan perguruan tinggi untuk bertanggung jawab sehingga ketiga permasalahan sosial tersebut dapat terpecahkan. Telah dilakukan kajian pustaka untuk menemukan konsep USR yang membuka peluang bagi keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tinggi dengan mudah. Kemudian, ada jaminan baginya untuk lulus sebagai penyuluh peternakan mandiri dengan memiliki jejaring komunitas yang siap mengembangkan sektor peternakan sebagai kekuatan pemberdayaan masyarakat di wilayah jejaringnya.

Kata kunci: USR, pemberdayaan masyarakat, sektor peternakan

Abstract

The issue of college social responsibility or University Social Responsibility (USR) is currently growing. The existence of higher education autonomy policies has an impact on increasing the cost of higher education, further limiting opportunities for access to underprivileged families. While college graduates still occupy the highest position as educated unemployed. But strangely the need for extension workers in the livestock sector is still very large and not being met. Such facts require the sensitivity of universities to be responsible so that the three social problems can be solved. A literature review has been conducted to find the concept of USR which opens opportunities for underprivileged families to study higher education easily. Then, there is a guarantee for him to graduate as an independent farmer counselor by having a community network that is ready to develop the livestock sector as a force for community empowerment in his network area.

Keywords: USR, community empowerment, livestock sector

PENDAHULUAN

Dewasa ini tengah berkembang isu tentang tanggung jawab sosial bukan saja perusahaan profit tetapi juga organisasi non profit seperti perguruan tinggi. Topik tanggung jawab sosial perguruan tinggi atau *Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions* sangat menarik dan menjadi tuntutan banyak kalangan, ketika angka partisipasi pendidikan tinggi masih sangat rendah (18,36%) sedang tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi justru tertinggi diantara pengangguran terdidik lainnya (12,78%) (Nizam, 2013 dan Kemenpora, 2013).

Khusus pada perguruan tinggi pengelola program studi peternakan, tuntutan tanggung jawab sosial ini harus mampu berkontribusi pada peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pembukaan lapangan kerja di bidang peternakan. Tanggung jawab sosial perguruan tinggi ini juga harus diarahkan pada ketersediaan 4 sumber daya minimal dalam penyuluhan untuk pemberdayaan masyarakat di sector peternakan yang meliputi : 1) Pengembangan kemampuan penyuluh peternakan; 2). Penyediaan dan pengembangan materi penyuluhan peternakan; 3). Fasilitas ketersediaan sarana penyuluhan peternakan, dan 4) Kontribusi pembiayaan untuk pelaksanaan penyuluhan peternakan. Hal ini dapat menjadi peluang pemecahan permasalahan adanya sistem penyuluhan yang belum efektif (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

Tony (2005) dan Mutolib, Sumaryo dan Viantimala (2013) menyatakan bahwa sebuah tanggung jawab dimulai dari keinginan perusahaan atau organisasi untuk dapat berkelanjutan (*sustainable*), beroperasi lebih lama, mengikuti kemajuan yang ada dan dapat terus bertahan dalam bisnis selama beberapa dekade. Keberlanjutan organisasi dapat diupayakan melalui dua hal, yaitu : pertama, menjalankan usaha yang menguntungkan sehingga mampu berinvestasi dan kedua, harus dipercaya serta didukung oleh semua pihak

yang berhubungan secara internal maupun eksternal yang meliputi pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, pengamat, media dan kalangan tertentu seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Mengacu pada pendapat Tony (2005) tersebut, keberlanjutan penyelenggaraan perguruan tinggi pengelola program studi peternakan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sangat tergantung pada partisipasi masyarakat yang tercermin pada jumlah mahasiswa yang dimiliki atau *student body* serta besarnya dukungan stakeholder khususnya di sektor peternakan. Kedua hal tersebut menjadi kunci utama dalam menyusun strategi tanggung jawab sosial PTS ini. Angka partisipasi pendidikan tinggi yang sangat rendah, tingginya pengangguran terdidik serta rendahnya ketersediaan SDM penyuluh peternakan merupakan peluang sekaligus tantangan bagi PTS pengelola program studi peternakan untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab sosialnya dalam mendorong partisipasi masyarakat.

Mencermati hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah menemukan konsep tanggung jawab sosial perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan yang mensinergikan ketiga peluang di atas. Konsep temuan ini harus dapat diimplementasikan melalui integrasi program Tri Dharma Perguruan tinggi baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi terhadap indikator IPM ke dalam manajemen tata kelola PTS yang sehat.

METODE PENELITIAN

Studi literatur telah dilakukan untuk menemukan konsep tanggung jawab sosial perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial dewasa ini merupakan topik yang menarik dan menjadi pusat perhatian banyak kalangan, tidak saja pada perusahaan sebagai organisasi profit tetapi juga pada organisasi-organisasi non profit seperti sekolah, rumah sakit, organisasi sosial termasuk juga perguruan tinggi. Menurut Sulistyaningtyas (2006), ada berbagai macam faktor yang membuat topik tanggung jawab sosial ini menjadi penting dalam perjalanan sebuah organisasi, yaitu : (1) Adanya arus globalisasi, yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis pembatas teritorial sehingga menghadirkan universalitas. Dengan demikian menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang dimana saja sebagai mata rantai globalisasi.; (2) Konsumen dan investor sebagai publik primer organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya; (3) Sebagai bagian dalam etika berorganisasi, maka dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik (lebih layak dikenal dengan *good corporate governance*); (4) Masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah memenuhi standard etika berorganisasi, ketika organisasi tersebut peduli pada lingkungan dan masalah sosial kemanusiaan; (5) Tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada organisasi; (6) Tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama dan setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut.

Pemahaman akan tanggung jawab sosial sebenarnya telah ada pada setiap diri manusia sejak dilahirkan. Manusia adalah makhluk

sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain. Menurut Dr. Ali Shariati yang dikutip oleh Agustian (2001) menyatakan bahwa manusia adalah makhluk dua dimensi yang membutuhkan penyaluran kebutuhan akan kepentingan jasmani dan rohani. Setiap manusia mempunyai prinsip pertanggung-jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Oleh karena itu setiap tindakan yang dilakukan manusia harus tidak berdampak buruk terhadap orang lain dan inilah tanggung jawab sosial.

Wood (1991) menyatakan ada tiga prinsip tanggung jawab sosial, yaitu : 1) perusahaan adalah institusi sosial karenanya wajib untuk menggunakan kekuatannya secara bertanggung jawab, 2) perusahaan bertanggung jawab terhadap keluaran yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat, dan 3) individu dalam perusahaan adalah agen moral yang berkewajiban untuk menggunakan kebijaksanaan dalam membuat keputusan.

Ajaran agama Islam menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial yang merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi atau perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu beradameliputi tiga domain, yaitu : 1) Pelaku-Pelaku Organisasi yang terdiri dari hubungan perusahaan dengan pekerja (QS. An-nisa ayat 149; hubungan pekerja dengan perusahaan dan hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain(distributor, konsumen, pesaing); 2) Lingkungan Alam (QS. Al-A'raf ayat 56) dan 3) Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Meutia, 2010).

Meutia (2010) berpendapat bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan CSR adalah *shariah enterprise theory*. Hal ini karena dalam *shariah enterprise theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah

tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Di Indonesia, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu amanah undang-undang yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru. Dengan adanya undang-undang ini, industri atau korporasi-korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan merupakan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, melainkan setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial dan aspek lingkungan yang biasa disebut (*triple bottom line*) sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2007).

Ada banyak definisi yang diberikan untuk konsep CSR. Dari kata-kata '*corporate*', '*social*' dan '*responsibility*' yang terkandung dalam istilah ini maka CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya (www.6.miami.edu.) Kamus online Wikipedia mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep bahwa suatu organisasi (khususnya, tapi tidak terbatas pada, perusahaan) memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas dan pertimbangan ekologis dalam segala aspek dari usahanya.

The International Organization of Employers (IOE) mendefinisikan CSR sebagai

"Initiatives by companies voluntarily integrating social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their business operations and in their interaction with their stakeholders". Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, CSR merupakan tindakan perusahaan yang bersifat sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan negara. Kedua, definisi tersebut memandang CSR sebagai aspek inti dari aktifitas bisnis di suatu perusahaan dan melihatnya sebagai suatu alat untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan (<http://library.findlaw.com/2005/Juli/11/246322.html>).

Menurut Kalangit (2009) definisi yang diterima luas oleh para praktisi dan aktivis CSR adalah definisi menurut *The World Business Council for Sustainable Development* yaitu bahwa CSR merupakan suatu komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. Sedang dalam Pedoman CSR bidang Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan CSR adalah tindakan yang melampaui kepatuhan kepada segala hukum dan peraturan yang berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, untuk: 1). Berkomitmen pada perilaku bisnis yang etis untuk meningkatkan kualitas hidup dari para pemangku kepentingan dan 2). Berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan.

Siregar (2007) menyatakan bahwa masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). CSR tidak memberikan hasil secara keuangan jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa

mendatang. Investor juga ingin investasinya dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya memiliki citra yang baik di mata masyarakat umum. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutannya, sehingga perusahaan tetap akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* / GCG)

Prinsip tata kelola perusahaan yang dimaksud adalah: 1) Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan. 2) Akuntabilitas, yaitu prinsip kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang memungkinkan pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. 3) Pertanggungjawaban, yaitu prinsip kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 4) Kemandirian, yaitu prinsip pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5) Kewajaran, yaitu prinsip perlakuan yang adil dan sama dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ibarakaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia

sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG jugadiharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan *good governance* dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Lingkup Tanggung jawab sosial

Wibisono (2007) menyatakan bahwa implementasi CSR di Indonesia belum ada acuan yang jelas. Selama ini implementasi CSR hanya mengandalkan hati para CEO korporasi yang bersangkutan. Artinya, jika CEO memiliki hati yang bermoral dan kesadaran bisnis yang manusiawi, besar kemungkinan akan menerapkan kebijakan CSR yang layak. Sebaliknya, jika orientasi CEO hanya pada profit semata maka hanya akan berfikir tentang kepuasan pemegang saham saja dengan mengejar produktivitas tinggi, profit tinggi dan nilai saham tinggi.

Menyadari akan hal tersebut yang tidak hanya berlaku di Indonesia, maka *International Standard Organization* (ISO) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk tim yang membidani lahirnya panduan dan standarisasi tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000.

Lingkup tanggung jawab sosial meliputi 7 aspek sebagaimana yang tercantum dalam isu utama ISO 26000 sebagaimana dijelaskan oleh Rachman et al.(2011) yaitu :

- 1) Tata kelola organisasi yang ditunjukkan dengan kepatuhan pada hukum, akuntabilitas, transparansi, kode etik, pengenalan profil dan minat stakeholder.
- 2) Hak asasi manusia yang meliputi hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, budaya dan kelompok rentan, serta hak dasar dalam kerja.
- 3) Aktivitas tenaga kerja, dilihat dari pekerja dan hubungan antar pekerja, kondisi kerja

dan perlindungan sosial, dialog sosial, kesehatan dan keamanan kerja, serta sumber daya manusia)

- 4) Lingkungan, ditandai dengan preventif polusi, konsumsi berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta proteksi dan restorasi lingkungan alam.
- 5) Aktivitas operasi yang fair, seperti anti korupsi dan anti suap, pelibatan tanggung jawab politik, kompetisi yang fair, promosi tanggung jawab sosial melalui rantai pasok, serta perhatian pada HAKI.
- 6) Isu konsumen yang meliputi marketing yang fair, praktik perjanjian, perlindungan keamanan dan kesehatan konsumen, provisi dan pengembangan produk dan jasa yang memberi manfaat sosial dan lingkungan, layanan konsumen, penyelesaian perselisihan, privasi dan perlindungan data konsumen, akses pada produk dan servis utama, konsumsi berkelanjutan, serta pendidikan dan kepedulian.
- 7) Kontribusi pada komunitas dan masyarakat seperti pelibatan komunitas, kontribusi pada pengembangan ekonomi dan kontribusi pada pengembangan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh CECT di Indonesia menunjukkan bahwa CSR memiliki beberapa tingkatan berdasarkan ruang lingkup dan kompleksitasnya, yaitu :

1. Kepatuhan terhadap semua hukum yang ada
2. CSR dalam bentuk *Filantropi*
3. CSR dalam bentuk *Community Development*
4. CSR dimana perusahaan mengandung dampak negatif yang timbul dari bisnisnya dan meningkatkan dampak positif bisnisnya.
5. CSR sebagai suatu sistem yang terintegrasi dalam perencanaan bisnis perusahaan (Radyati, 2010 dalam Kementerian Kehutanan, 2011).

Aktivitas yang bisa dilakukan untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dapat

berupa santunan atau bantuan langsung yang sifatnya hanya charity dan filantropi. Namun terkait dengan permasalahan dan kebutuhan bangsa Indonesia diharapkan lingkup tanggung jawab sosial ini mampu menyentuh upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi pada permasalahan kemiskinan, keterbelakangan dan pengangguran. Tuntutan pembangunan yang berpusat pada manusia terhadap praktek CSR di Indonesia adalah tercapainya peningkatan IPM yang lebih baik.

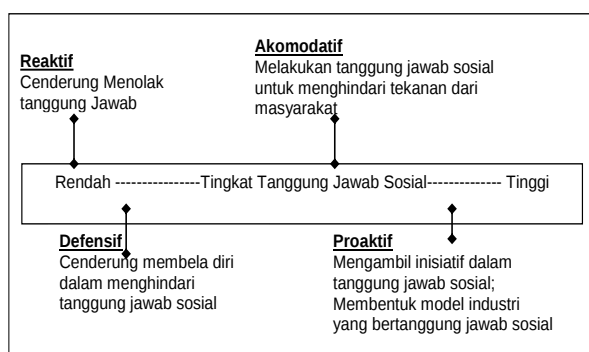
Strategi Tanggung jawab sosial

Berbicara soal strategi tanggung jawab sosial maka perlu melihat terlebih dahulu adanya tantangan dan peluang dalam tanggung jawab sosial tersebut. Jalal (2012) telah mengidentifikasi tantangan dan peluang CSR di Indonesia dimana ada 7 tantangan yang harus dipecahkan dan 8 peluang yaitu :

1. Pemahaman tentang CSR yang masih beragam. Sebagian besar perusahaan dan pemangku kepentingan di Indonesia belum memiliki pemahaman atas CSR yang sesuai dengan definisi CSR arus utama atau sebagaimana yang dipahami di level global.
2. Transisi menuju CSR yang strategis. Para manajer dan direktur CSR di Indonesia menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa CSR bukanlah sekadar biaya, melainkan adalah investasi yang menguntungkan pemangku kepentingan dan perusahaan.
3. Kepentingan politisi atas “dana CSR” mengakibatkan banyak regulasi tentang CSR tidak ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melainkan untuk kepentingan diri dan golongannya.
4. Terlampau sedikit jumlah kelompok masyarakat sipil, terutama LSM, yang memiliki ideologi, pengetahuan dan keterampilan untuk membantu perusahaan. Kebanyakan LSM enggan berhubungan dengan perusahaan, memilih untuk

- bersikap anti, serta menerapkan cara-cara kuno untuk berinteraksi: demonstrasi.
5. Kelompok-kelompok masyarakat yang memandang CSR sekadar sebagai donasi memiliki ekspektasi yang sangat tinggi atas “dana CSR” perusahaan, terutama di tempat-tempat dimana pemerintah pusat dan daerah gagal menjangkau mereka.
 6. *CSR-washing* atau penunggang CSR untuk kepentingan pengelabuan citra. Banyak perusahaan yang menonjolkan aktivitas social tertentu, tanpa melakukan perbaikan substansial dalam manajemen dampak.
 7. Sebagian besar media massa belum memiliki pemahaman yang benar atas CSR. Di satu sisi mau tampil kritis terhadap perusahaan, disisi lain mengharapkan perusahaan mengiklankan “CSR” mereka, tanpa peduli apakah kandungan informasinya benar dan berimbang.
- Adapun 8 peluang yang berhasil diidentifikasi oleh Jalal (2012) adalah :
1. Minat akademisi atas CSR meningkat dengan pesat. Banyak sekali mahasiswa tingkat sarjana, magister dan doktoral yang meminati CSR. Sekolah pasca sarjana dalam konsentrasi CSR sudah didirikan, dan ada kedudukan profesor dalam bidang CSR.
 2. Pertukaran informasi mengenai CSR yang semakin banyak terjadi dan mudah diakses. Ada banyak seminar, pelatihan, dan loka karya CSR di tingkat nasional dan regional, dengan peminat yang terus meningkat jumlahnya. Buku dan artikel CSR semakin mudah didapat.
 3. Tercapainya kesepakatan global dalam petunjuk CSR, yaitu ISO 26000. Mulai 1 November 2010, dunia sudah menyepakati definisi, prinsip, subjek inti, dan tata cara CSR diintegrasikan ke dalam organisasi. Perusahaan-perusahaan progresif telah mulai melakukan *gap analysis* dan membuat *roadmap* pemenuhannya.
 4. Telah diidentifikasinya berbagai perusahaan progresif, dari berbagai industri. Banyak penghargaan yang diberikan terlepas dari mutu penyelenggaraannya telah membuat perusahaan-perusahaan bisa saling belajardari perusahaan-perusahaan “model” itu.
 5. Telah mulai bersemi LSM-LSM yang bekerja bersama perusahaan, tanpa kehilangan independensi dan tetap mempertahankan visi-misinya. Bahkan, berbagai LSM asing sudah memiliki direktur untuk fungsi *corporate engagement*, yang bukan sekadar dikaitkan dengan *fund raising*.
 6. UU PPLH yang sangat progresif, yang semakin mendorong perusahaan untuk mengelola dampak lingkungannya dengan baik. Peringkat PROPER semakin dianggap serius sebagai pertanda kinerja lingkungan dan sebagian kinerja sosial.
 7. Berkembangnya pelaporan berkelanjutan yang didorong oleh NCSR. Walaupun belum cukup banyak jumlahnya (sekitar 40 di tahun 2012), perusahaan-perusahaan yang CSR dianggap progresif biasanya ditandai dengan keterbukaan yang komprehensif dengan menggunakan standar GRI.
 8. Tumbuhnya wacana dan praktik kewirausahaan dan bisnis sosial, yang semakin mendorong inovasi dalam CSR (berlomba dalam kebajikan) dan membuka lebih banyak peluang kemitraan dalam penyelesaian masalah sosial dan lingkungan.
- Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menurut Kreitner et al. (1992) bisa dikategorikan ke dalam lima kelompok yaitu : 1) Reaktif, perusahaan yang tergolong reaktif akan cenderung menolak tanggung jawab sosial; 2) Defensif, yaitu perusahaan yang cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial; 3)

Akomodatif, yaitu perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat, dan 4) Proaktif, yaitu perusahaan yang mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial dan membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. Lebih jelas digambarkan dalam ilustrasi 1.



Gambar 1. Strategi Pengelolaan CSR

Melihat tantangan, peluang dan memperhatikan strategi pengelolaan CSR oleh perusahaan tersebut maka pemberdayaan peternakan berbasis pendidikan karakter dapat menjadi pilihan strategi bagi perusahaan untuk mengembangkan model industri yang bertanggung jawab sosial.

Strategi tanggung jawab sosial melalui pemberdayaan masyarakat di sector peternakan adalah untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan ketidak-berdayaan yang disebabkan oleh dua faktor utama yang saling mengkait satu sama lain, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti : rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Sementara faktor eksternal penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada. Disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat ditumbuhkembangkan (Sumodiningrat, 2001). Berpijak pada logika penyebab kemiskinan dan

ketidakberdayaan masyarakat itu maka strategi tanggung jawab sosial melalui pemberdayaan masyarakat di sector peternakan yang diterapkan harus menyentuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik pada sisi internal maupun eksternal. Para pelaku pembangunan dituntut untuk secara konsisten dan berkesinambungan menciptakan dan membina kebersamaan sehingga dampaknya bukan hanya pada pemberdayaan posisi masyarakat lapisan bawah namun lebih jauh juga pada penguatan sendi-sendi perekonomian negara secara keseluruhan.

Pengertian dan Konsep Tanggung Jawab Sosial Perguruan Tinggi

UUD 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sinilah perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran masyarakat (*learning society*) untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial.

Perguruan tinggi mampu melintasi dunia karena memiliki peran kepemimpinan sosial melalui penelitian dan pengajaran sehingga bisa mengubah dunia dengan praktek CSR yang inovatif dengan menciptakan pemimpin masa depan. Oleh karena itu keterlibatan perguruan tinggi turut menentukan keberhasilan CSR (Idowu, 2008). Dima et al. (2013) menyatakan bahwa ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan terkait konsep tanggung jawab sosial di perguruan tinggi yaitu : 1) perguruan tinggi mencetak calon tenaga kerja bagi perusahaan negeri maupun swasta; 2) perguruan tinggi memiliki peran edukasional dan riset yang penting dalam suatu masyarakat di mana terdapat berbagai perusahaan yang bergerak di dalamnya; 3) perguruan tinggi membantu orang-orang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan pribadi dan sosialnya; 4) seiring pasar pendidikan tinggi berubah,

perguruan tinggi perlu membentuk hubungan yang kuat dengan para stakeholder-nya (contoh: mahasiswa, petinggi universitas, negara, dan masyarakat) agar tetap kompetitif; 5) perguruan tinggi berkontribusi besar dalam pembelajaran seumur hidup dan daya kerja/*employabilities* regional; 6) keterlibatan perusahaan dalam lingkungan universitas telah meningkat karena adanya marketisasi pelayanan pendidikan tinggi yang meluas; 7) timbulnya kesadaran kolektif para mahasiswa dan professor telah menciptakan suatu kebutuhan untuk mengimplementasikan tindakan inisiatif yang berkaitan dengan tanggung jawab social; 8) perguruan tinggi didesak untuk memainkan peran pentingnya dalam menghadapi tantangan lingkungan dengan cara mengintegrasikan konsep yang berkesinambungan dalam kurikulum mereka.

Kini, masih saja terjadi jarak yang lebar antara perguruan tinggi dengan basis-basis perubahan masyarakat yang ada. Tidaklah berlebihan sekiranya perguruan tinggi diharapkan dapat berperan lebih progresif dalam mempengaruhi perubahan masyarakat secara lebih sistematis dan berdampak luas di masa-masa mendatang. Untuk itu kedekatan perguruan tinggi dan masyarakat harus diusahakan melalui program kemitraan kelompok-kelompok masyarakat dengan perguruan tinggi (Karsidi, 2005). Salah satu bentuk kedekatan yang bisa dibangun oleh perguruan tinggi adalah sinergi dengan perusahaan untuk penyerapan alumni sebagai tanggung jawab sosial perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi tidak dipandang sebagai institusi yang melahirkan pengangguran-pengangguran terdidik yang pada gilirannya melemahkan semangat masyarakat untuk melanjutkan studi. Hal ini merupakan ancaman bagi upaya pencapaian angka partisipasi pendidikan tinggi dan akan berpengaruh terhadap tolok ukur lama belajar pada Indeks Pembangunan Manusia.

Renstra Direktorat Pendidikan Tinggi tahun 2010-2014 menyatakan bahwa modal insani

menjadi kunci utama kemajuan bangsa. Oleh karena itu peran pendidikan tinggi menjadi sangat sentral dalam membangun daya saing bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karsidi (2005) menjelaskan bahwa peran Perguruan Tinggi (selain melakukan pengajaran *reguler konvensional*) dalam era otonomi daerah harus mampu melakukan upaya-upaya strategis yang bermanfaat dalam bentuk yang lebih operasional dalam pengembangan UMKM antarlain melalui: 1. Mengembangkan model pembangunan (khususnya untuk pengembangan UMKM) yang benar-benar berbasis pada keilmuan dan sumberdaya lokal. 2. Membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan bagi kebutuhan masyarakat UMKM dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis. 3. Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat UMKM dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada. 4. Membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tentang UMKM tersebut.

Penelitian di Afrika menunjukkan bahwa persepsi karyawan atau pegawai di institusi pendidikan tinggi belum menunjukkan kecenderungan positif terhadap CSR dan belum memahami konsep CSR (McDonald dan Liebenberg, 2006). Sedang di Indonesia saat ini pemahaman terhadap CSR semakin kuat di kalangan perguruan tinggi, terbukti secara empiris semakin banyak perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan kajian-kajian seputar CSR, menjalin kerjasama dalam implementasi CSR, memasukkan CSR dalam kurikulum, GBPP, membuka program studi CSR dan sebagainya (Majalah Bisnis dan CSR, Edisi Juli 2008).

Strategi Tanggung Jawab social Perguruan Tinggi

Strategi tanggung jawab social perguruan tinggi dapat dilakukan dengan membuat program yang terintegrasi dengan tridharma

perguruan tinggi. Menurut Zulkarnain (2009), perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mandiri sudah melakukan program-program tanggung jawab social melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti Kuliah kerja Nyata atau KKN, pendampingan, pemberdayaan, pelatihan dan kegiatan lainnya. Namun menurutnya belum ada audit social yang dilakukan terhadap dampak program tanggung jawab social perguruan tinggi tersebut kepada masyarakat internal maupun eksternal kampus.

Perencanaan program tanggung jawab social di perguruan tinggi tentunya perlu ada keterpaduan kerjasama antara Humas dan lembaga pengabdian kepada masyarakat (Zulkarnain, 2009). Konsep IMC menjadi sangat penting bagi perguruan tinggi karena harus dipahami bahwa komunikasi yang terencana, terintegrasi dan diterapkan dalam berbagai bentuk akan memberikan penyadaran, pemahaman dan dampak yang maksimal bagi para penerima manfaat perguruan tinggi. Diah (2008) menyatakan bahwa ada 6 (enam) peran perguruan tinggi yang bisa dilakukan sebagai implemetasi CSR yaitu : 1) Sebagai pelaku CSR itu sendiri; 2) Sebagai Informan; 3) Sebagai Pendamping; 4) Sebagai Mediator; 5) Sebagai Motivator dan 6) Sebagai pencetak ahli CSR.

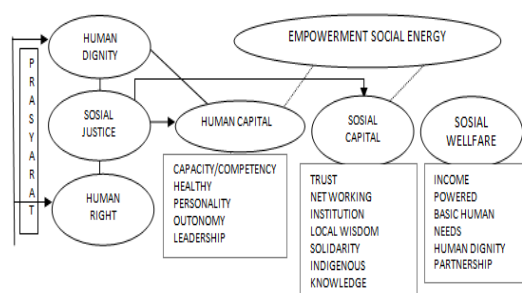
Model Tanggung Jawab Sosial Perguruan Tinggi untuk Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Peternakan

Peternakan sebagai bagian dari pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan kedaulatan pangan di era global. Yunastiti (2008) dalam Prawoto (2012) menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Menurut ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan

pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh.

Kesadaran akan hal tersebut harus menjadi pola pikir bagi para akademisi dan lulusan perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar utama kemajuan dan daya saing bangsa harus memiliki tanggung jawab social ke arah itu. Perguruan tinggi khususnya yang membidangi peternakan, dituntut dapat berkontribusi nyata dalam menghadapi tantangan tersebut dengan mengembangkan model tanggung jawab social untuk pemberdayaan masyarakat di sector peternakan sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya menuju kedaulatan pangan dan negara (Sumardjo, 2012; Zulkarnain, 2009 dan Karsidi, 2005).

Model tanggung jawab social perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan yang harus dikonstruksi hendaknya merupakan pengembangan hasil pembelajaran melebihi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu dan membentuk warga negara yang baik dengan daya saing dan karakter yang terlatih serta unggul. Perguruan tinggi bukan hanya sebagai penyedia layanan pendidikan, tetapi juga pembentuk identitas pribadi dengan tanggung jawab besar terhadap masyarakat, bangsa dan dunia (Burcea and Marinescu, 2011).



Gambar 2. Keterkaitan logis antara kesejahteraan, kapital manusia, kapital sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Sumardjo, 2012)

Tanggung jawab besar ini dapat dilihat dari kontribusi perguruan tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumardjo (2012) menggambarkan hubungan antara kesejahteraan, modal SDM, modal sosial dan lingkungan sebagaimana dalam Gambar 2.

Memperhatikan konsep keterkaitan antara kesejahteraan, kapital manusia, kapital sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana dijelaskan oleh Sumardjo (2012) dalam Gambar 2, maka perguruan tinggi dapat melakukan revitalisasi peran penyuluh. Revitalisasi dilakukan dengan mengubah paradigma *from extension worker to communication worker*. Peran penyuluh harus diubah dari hanya sekedar penyampai informasi atau juru transfer teknologi menjadi seorang *intervensionist* di dalam inovasi dan komunikasi pertanian (Lewoema dan Fauzan, 2008). Perguruan tinggi harus mampu melahirkan penyuluh yang tidak hanya sebagai penyampai metode dan teknik budidaya semata tetapi harus mampu menjadi inovator-inovator yang berkarakter dan bermoral dalam melakukan komunikasi pertanian. Sebuah perguruan tinggi dapat melakukan pengembangan penelitian, menciptakan suatu produk kemudian membentuk UKM baru untuk menjual produk tersebut. UKM yang dibentuk berbasis teknologi yang dikembangkan oleh dosen dari perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru dan pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat (<http://fapet.ugm.ac.id>) diakses pada tanggal 15 Agustus 2014).

KESIMPULAN

Tanggung jawab sosial perguruan tinggi untuk pemberdayaan masyarakat di sektor peternakan harus merupakan integrasi solusi atas tiga permasalahan pokok di sektor peternakan yaitu keterbatasan SDM penyuluh, keterbatasan sumberdaya penyuluhan dan penjaminan keberlanjutan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Burcea, M and P. Marinescu. 2011. Students' Perceptions on Corporate Social Responsibility at The Academic Level Case Study : The Faculty of Administration and Business, University of Bucharest. *Journal of Corporate Social Responsibility*. Volume VIII. Nomor 29. Hal : 207 – 220
- Diah, N. 2008. Peran Perguruan Tinggi dalam Implementasi CSR. Makalah. Dipresentasikan pada Lomba Karya Ilmiah di STIE Perbanas, tahun 2006. Diakses dari <http://dyahnirmalawati.blogspot.com/2008/09>
- Dima, A.M., S. Vasilache, V. Ghinea and S. Agoston. 2013. A Model of Academic Social Responsibility. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, No. 38 E/2013. PP : 23 - 43
- Idowu, S.O. 2008. An Empirical Study of What Institutions of Higher Education in UK Consider to be Their Corporate Social Responsibility. *Transactions on Ecology and Environment*, Vol. 108. Hal : 263 – 273.
- Kalangit, H.K.M. 2009. Konsep Corporate Social Responsibility dan Pelaksanaannya di Indonesia. www.csrindonesia.com diakses tanggal 8 Agustus 2010 jam 16.24 wib.
- Karsidi, 2005. Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Usaha Mikro Kecil Menengah di Era Otonomi Daerah. *Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis ke 22 Universitas Batik Surakarta (UNIBA)*, Surakarta, 20 Agustus 2005
- Lewoema, Z.K. dan R. Fauzan. 2008. Pembangunan Pertanian Rakyat Menuju Ketahanan dan Swasembada. Sebuah Analisis Hubungan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional. *Makalah*. Dipresentasikan pada Konferensi Pelajar Indonesia di Den Haag, tanggal 28 September 2008.
- McDonald, F and J. Liebenberg. 2006. The Perceptions of Employees a Private Higher Education Institution Towards Corporate Social Responsibility. *Journal of Human*

- Resource Management*. Volume 4 Nomor 1. Hal : 27 – 35.
- Mehta, S. R. 2011. Corporate Social Responsibility (CSR) and Universities : Towards an Integrative Approach. *International Journal of Social Science and Humanity*. Volume 1 Nomor 4 Edisi Nopember 2011. Hal : 300 - 304
- Meutia, I. 2010. “*Shariah Enterprise Theory* sebagai Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah”. *Disertasi*. Doktor Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.
- Mutolib, A. Sumaryo, S. dan Viantimala, B. 2013. Kebutuhan Masyarakat Sekitar Perusahaan untuk Program Corporate Social Responsibility PT Pln (Persero) Sektor Pembangkitan Tarahan: Kasus di Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 1(2): 126-133.
- Nizam. 2013. Keterangan Mengenai Pasal-pasal dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi. luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UU12-2012/Nizam.pdf. Diakses pada tanggal 16 September 2013 jam 10.28.
- Prawoto, N. 2012. Model Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi pada Masyarakat Dieng di propinsi Jawa tengah). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 8, Nomor 2, September 2012. Hal : 135 – 154
- Sulistyaningtyas, I. D. 2006. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam program Kampanye Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 3 Nomor 1 Juni 2006 : 63 – 67.
- Sumaryo. 2009. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat : Kasus di Propinsi Lampung. *Disertasi*. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Sumardjo. 2012. Kelembagaan dan Kompetensi Penyuluh dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Makalah*. Disampaikan dalam Forum Pertemuan Kelembagaan Pembangunan di Daerah, di Padang Sumatera Barat, tanggal 17 April 2012.
- Tony H. 2005. *Corporate Responsibility-The Key to Corporate Sustainability*. Exploration & Production BP. Moscow: Mendeleyev University.